



Aplikasi Systematic Mapping Review Sebagai Upaya Pengukuran Efektivitas Pembangunan Desa Pesisir Natuna

Armauliza Septiawan ¹⁾*, Sintaningrum ²⁾

¹ Mahasiswa S-3 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran
Jalan Bukit Dago Utara No. 25 Kecamatan Coblong Kota Bandung Jawa Barat, 40135 Indonesia.

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung Indonesia

* Korespondensi Penulis. E-mail: armauliza14001@mail.unpad.ac.id, Telp: +6281915481748

Abstrak

Penelitian ini mengkaji berbagai permasalahan pembangunan yang mencakup potret minimnya partisipasi masyarakat desa dalam aktivitas perencanaan, alokasi sumber daya, pelaksanaan maupun pengawasannya. Dalam eksistensinya, problem pembangunan desa juga terjadi pada desa pesisir di sekitar wilayah perbatasan dan terluar Indonesia, sehingga secara signifikan menginterpretasikannya sebagai inefektivitas pembangunan desa pesisir yang memotivasi dan menarik minat perhatian para peneliti di Indonesia. Berbagai penelitian banyak dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yang memetakan pemikiran tentang efektivitas pembangunan desa pesisir secara sistematis (Riset Indeks, Inklusif Filtrasi dan Pemetaan). Studi ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan secara teknis data yang dikumpulkan melalui filtrasi atau screening of paper terhadap 99 topik penelitian yang relevan dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik systematic literature review yang menghasilkan diskusi dan bahasan agregasi tentang arah penelitian kontemplatif yang dilakukan melalui analisis sistematis terhadap 21 topik penelitian terindeks yang telah dikumpulkan menggunakan teknik screening of papers dan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Hasil analisis data penelitian inklusif secara sistematis, menjelaskan bahwa letak penelitian yang concern terhadap proses membangun desa secara efektif mencakup perilaku agen pembangunan desa pesisir saat ini masih minim sehingga memerlukan upaya pengukuran keberhasilan proses pembangunan yang tepat bagi desa pesisir.

Kata kunci: *Systematic Mapping Review, Efektivitas Pembangunan Desa Pesisir*

Systematic Mapping Review Application As A Measuring Efforts To The Rural Coastal Development Effectiveness Around Natuna

Abstract

This research has concerned about the various development issues such as the lack of rural participation especially in planning activities, resource allocation, implementation and also the supervision. In its existence, the rural development problem also occurs around the rural coastal at the Indonesia's borde area, hence it interprets as the ineffectiveness significantly of rural coastal development which motivates and attracts the researchers attention in Indonesia. This study uses a qualitative approach then the collected data through screening of papers technically for about 99 relevant research topics and then analyzed using systematic literature review techniques which generating the aggregation discussion and describes the contemplative research direction conducted through the 21 research topics indexed inclusively which has been generated using screening of papers techniques and grouped based on certain classifications. The results of systematic research data analysis inclusively, explain that the concerned research position was about the rural development process effectively includes the rural coastal development agents behavior, hence it requires efforts to exactly measuring the development process which better for rural coastal.

Keywords: *Systematic Mapping Review, Rural Coastal Development Effectiveness*

1. Pendahuluan

Fokus pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional secara integral yang juga sejajar dengan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan tersebut memiliki tujuan masing-masing yang memerlukan suatu perwujudan praktik Administrasi Publik yang relevan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke- IV yakni;

... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...

Jelaslah bahwa sebenarnya dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut tidak dapat memisahkan dari wujud praktik Administrasi Publik yang dilaksanakan pemerintah dengan beberapa catatan penting seperti adanya penguatan pada pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam terminologi pemikiran sebagai *citizen* atau terhadap *private/ business sector*. Dalam kaitan inilah menjadi jelas bahwa Administrasi Publik sangat penting dikembangkan pemikirannya dan cara praktiknya karena sangat diperlukan untuk memperbaiki upaya pencapaian tujuan pembangunan yang efisien, efektif serta berkeadilan sosial.

Harmonisasi antara dinamika pembangunan dan perkembangan Ilmu Administrasi Publik tentu mendapatkan respon yang ditunjukkan oleh dilakukannya penelitian ilmiah sehingga keberadaan Administrasi Publik itu sendiri juga mengalami penyempurnaan seiring dengan berbagai perbaikan cara pemerintah melaksanakan praktik administrasi publik untuk mewujudkan pelayanan publik dalam kerangka mencapai kinerja kebijakan dan program pembangunan sehingga lahir beberapa paradigma yang diikuti yakni Administrasi Publik Klasik, *New Public Management* sampai kepada *New Public Service* dan paradigma *governance* (Ilmu, Holidin, & Handini, 2014). Setiap penelitian ilmiah tersebut berkembang pada letak yang berbeda-beda yang salah satunya mengambil posisi pada fokus pencapaian kinerja pembangunan secara efektif dimana penelitian ini diletakkan nantinya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 tahun 2014 tentang desa). Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, prioritas membangun desa telah mendapatkan perhatian yang serius. Sampai pada akhir tahun 2015 desa di Indonesia menurut Buku Induk

Kewilayahan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia berjumlah 74.093 desa yang tersebar pada 7.094 wilayah kecamatan. Jumlah desa ini jauh lebih besar atau hampir 9 kali lipat dari jumlah kelurahan yakni sebanyak 8.412 kelurahan. Wajarlah kemudian porsi desa yang memiliki porsi lebih besar mendapatkan perhatian yang besar khususnya dalam hal pembangunan.

Atas dasar gambaran tentang banyaknya jumlah desa tersebut, menunjukkan bahwa desa menjadi bagian yang sangat penting bagi pembangunan nasional khususnya yang terletak pada wilayah terluar atau terdepan NKRI. Informasi pada Buku Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015 menjelaskan bahwasanya hasil pencapaian pembangunan desa sesuai indeks pembangunan desa membangun khususnya pada seluruh desa di daerah perbatasan sungguh memprihatinkan. Hasil pengukuran terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) 2015 jumlah pedesaan di perbatasan yang memiliki status tertinggal dan sangat tertinggal sangat dominan. Sebanyak 644 Desa (45%) adalah Desa berstatus tertinggal dan 635 Desa (44%) berstatus sangat tertinggal. Rata rata Indeks Desa Membangun (IDM) Desa perbatasan adalah 0,498 sedangkan rata rata IDM nasional adalah 0,566 (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi, 2016). Situasi ini menggambarkan tingkat

kesejahteraan Desa perbatasan yang masih rendah.

Informasi tersebut menggambarkan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam kerangka desa membangun masih belum mencapai efektivitas yang baik sehingga pengembangan strategi pembangunan desa khususnya pada area pesisir secara nasional masih sangat diperlukan. Motif inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran bahwa jika berbagai upaya membangun desa telah banyak dilaksanakan namun masih belum menunjukkan efektivitas yang memuaskan, maka kehadiran berbagai upaya meneliti secara ilmiah akan memberikan pedoman ke arah kemajuan.

Secara dinamis kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan desa di Indonesia telah menunjukkan penguatan perhatian melampaui berbagai pendekatan dalam pembangunan desa (Adisasmita, 2006). Pendekatan pertumbuhan atau yang dikenal sebagai pembangunan ekonomi telah diterapkan sebagai tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di masa lalu, ternyata belum juga mampu menjadikan potret pembangunan desa menjadi efektif. Kebijakan pembangunan daerah dan desa pun secara berkesinambungan dikuatkan efektivitasnya melalui penggunaan pendekatan sosial, karakteristik lokalitas dan humanis. secara sistematis perkembangan tersebut juga menunjukkan adanya perhatian terhadap parameter pembangunan desa baik yang termaktub dalam kebijakan pembangunan secara integral maupun

setelah menjadi kebijakan tersendiri seperti hadirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penentuan capaian parameter pembangunan desa tersebut pun senantiasa berkembang sesuai kompleksitas permasalahan pembangunan desa yang dihadapi. Meski terus berkembang keinginan kebijakannya, namun parameter umum keberhasilan pembangunan desa ternyata belum mampu diterjemahkan secara nyata dan berpengaruh signifikan menyelesaikan persoalan pembangunan yang masih ditemui pada banyak wilayah desa pesisir di Indonesia. Kondisi ini tidak lain adalah karena masih adanya kecenderungan kesamaan penafsiran atas parameter keberhasilan pembangunan yang digunakan baik terhadap desa pesisir maupun desa Non Pesisir. Misalnya permasalahan menurunnya kualitas lahan pertanian akan berbeda dengan kerusakan ekosistem terumbu karang yang terjadi di desa pesisir. Dengan kata lain, melalui pengaturan yang sama (merujuk pada ukuran keberhasilan desa membangun sesuai Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016) justru menghasilkan potret kinerja pembangunan yang berbeda antara desa pesisir dan desa non pesisir. Padahal sebenarnya strategi ini adalah bentuk pengadministrasian yang memiliki cakupan luas sehingga, desa belum mengartikulasikannya kepada suatu format spesifik desa membangun tetapi masih mengarah kepada aktivitas penyeragaman dalam membangun desa. Fenomena ini yang berkontribusi

memotivasi dilakukannya penelitian ini dimana seharusnya dengan upaya yang terus berkembang, desa pesisir mampu memiliki posisi capaian pembangunan yang lebih efektif dari saat ini.

Salah satu potret kritis ini terletak pada pembangunan desa khususnya pada desa-desa pesisir di wilayah terdepan dan terluar NKRI seperti desa pesisir di Kabupaten Natuna. Gambaran pembangunan perdesaan pesisir secara nasional tersebut ternyata juga tidak berbeda dengan apa yang dialami oleh Kabupaten Natuna yang merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Kabupaten ini memiliki 154 pulau besar dan kecil dan sebahagian besarnya merupakan wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Vietnam, Kamboja serta Malaysia timur. Sebagai kabupaten yang memiliki jarak paling jauh ke pusat ibu kota Propinsi Kepulauan Riau, Natuna memiliki karakteristik pesisir yang melekat pada sebahagian besar wilayah pedesaan yang masih tertinggal khususnya dalam hal keterlayanan akan barang publik serta aksesibilitas rendah terhadap transportasi laut. Banyak permasalahan pembangunan yang masih ditemui sehingga jika dilihat cerminan Indeks Pembangunan Manusia untuk Kabupaten Natuna sampai pada akhir tahun 2015 mencapai tingkat 65,86. Potret pembangunan di Kabupaten Natuna ini sendiri bahkan juga tertinggal jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kepulauan Riau serta IPM rerata nasional dari hasil pencapaian human development

index atau IPM menurut Badan Pusat Statistik pada Tahun 2016. Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan cerminan utama kondisi pembangunan di Indonesia yang mencakup dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard of living*) (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi, 2016).

Pernyataan problem pembangunan diatas menunjukkan perbedaan Akar permasalahannya tentu mengarah kepada sulitnya mewujudkan pembangunan desa yang efektif bagi karakter permasalahan yang berbeda serta belum dikembangkan strategi pembangunan yang dianggap penting sebagai bentuk penguatan pendekatan sektoral bagi desa pesisir baik dalam kebijakan maupun manajemen pembangunannya. Keberadaan strategi kelestarian lingkungan pendukung aktivitas perekonomian nelayan misalnya mangrove, pemberdayaan ibu rumah tangga nelayan, sampai kepada tingkat kepedulian nelayan terhadap ancaman di tapal batas negara. Mengingat sebahagian besar desa pesisir di Kabupaten Natuna justru merupakan wilayah kepulauan pada batas negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Akan tetapi dengan segala kelebihanannya yang strategis tersebut, pembangunan desa pesisir di Kabupaten Natuna justru paradoksial karena Desa Pesisir di Natuna belum menggambarkan adanya perilaku yang sinergis antara agen

pembangunan yang terlibat, harusnya menjadi “pagar” fundamental kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang artinya sangat memerlukan perhatian khusus terhadap hambatan pembangunan untuk mewujudkan efektivitas pembangunan, yakni yang lebih spesifik mencerminkan lokalitas sektoral bahkan lebih kompleks dari desa lain yang bukan merupakan pagar kedaulatan NKRI. Sehingga dengan kondisi paradoksial tersebut memancing kehadiran praktek- praktek ilegal yang bersumber dari negara tetangga yang berbatasan secara langsung maupun tidak seperti China ataupun Thailand.

Pembangunan desa pesisir menurut diskusi penelitian ini diinterpretasikan sebagai proses membangun desa pesisir secara spesifik yakni yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan ciri kewilayahan yang berbeda bahkan kepemilikan potensi sumber daya alam yang berbeda. Analogi pemikiran ini sangat sederhana dimana bagi seorang pedagang, cara berdagang yang efektif adalah cara yang mampu memberikan keuntungan yang optimal, bagi Siswa di suatu sekolah mendapatkan peringkat Pertama di Kelas merupakan tanda belajar yang efektif. Artinya mengartikan efektivitas pembangunan desa pesisir tentu berbeda dengan desa di wilayah perkebunan (desa non pesisir lainnya). Demikian pula penelitian yang telah dikemukakan di atas, yakni setiap lokus penelitian memiliki perhatian utama

yang berbeda pula dalam memandang efektivitas pembangunan desa.

Demikian letak penelitian ini dalam peta keilmuannya yang telah berkembang secara dinamis sehingga mampu menjelaskan signifikansinya dalam memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif tentang desa di era desentralisasi akan memperkaya pengetahuan yang telah ada sebelumnya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pembangunan desa memperoleh pengetahuan yang baru akan hal ini.

2. Metode

Jenis Penelitian

Penelitian tentang mengukur dan mendalami konsep efektivitas pembangunan desa pesisir masih sangat terbatas dilaksanakan sehingga keberadaan penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksploratif. *Systematic review* adalah suatu metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian (Siswanto, 2010). Aplikasi *systematic review* jarang dilakukan dalam penelitian ilmu sosial khususnya di Indonesia. Banyak hal yang mendorong situasi demikian dikarenakan beberapa hal mencakup; penggunaannya yang kurang memungkinkan dalam penelitian individual atas dasar sulitnya mendapatkan data dan informasi (*published article*) tentang hasil-hasil

penelitian yang mampu didapatkan melalui laman jurnal ilmiah internasional bereputasi (*limited acces*), membutuhkan biaya yang cukup besar agar bisa mendapatkan artikel yang diperlukan (Siswanto, 2010), serta belum sepenuhnya menyadari bahwa subjektivitas dalam menggunakan teori pada upaya menganalisa suatu fenomena sosial yang terjadi sangat lazim terjadi (Nagendrababu, Pulikkotil, Sultan, Jayaraman, & Peters, 2018). Dengan demikian jenis penelitian eksploratif yang menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini justru bermaksud memperkaya khazanah pemikiran ilmu sosial khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi sehingga meski bukan dimaksudkan sebagai upaya generalisasi, namun penulis bermaksud mendapatkan suatu format objektivitas penggunaan teori yang relevan bagi penelitian individual yang diperlukan dalam mendalami pemikiran pembangunan desa di daerah terluar yang telah menjadi *tag line* bagi pembangunan nasional untuk kurun waktu 5 tahun terakhir.

Subjek dan Objek Penelitian

Diskusi sebelumnya menunjukkan bahwa cakupan penelitian ini masih sangat luas sebagai suatu entitas penelitian sosial yakni seluruh artikel ilmiah yang menaruh perhatian pada permasalahan efektivitas pembangunan desa. dengan demikian keseluruhan total populasi ini akan menjadi sangat luas. Atas dasar pendapat Bogdan & Biklen (1998) bahwa meski subjek yang cukup luas dari total populasi pengamatan

yang ada, dapat ditentukan hanya yang memiliki proporsi yang berkesesuaian dengan topik tujuan penelitian saja. Dengan kata lain yang menjadi subjek penelitian ini mencakup artikel ilmiah yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian ini adalah keseluruhan hasil penelitian yang telah diterbitkan pada jurnal-jurnal penelitian ilmiah bereputasi seperti pada laman jurnal;

1. <https://www.scimagojr.com/>,
2. <https://scholar.google.co.id>,
3. <https://www.proquest.com>,
4. <https://www.jstor.org>; dan
5. <https://doaj.org>.

Hasil penelusuran yang didapatkan merupakan artikel ilmiah *published* dalam bentuk teks. Adapun dalam penelitian kualitatif, dokumen informasi dalam bentuk teks lazim dipergunakan sebagai suatu ciri ketergantungan suatu penelitian terhadap suatu objek/ partisipan yang diteliti (Creswell, 2012). Secara operasional penelusuran yang dilakukan tentu akan menghasilkan jumlah artikel yang sangat beragam dan hamper tidak terbatas. Akan tetapi relevansi hasil penelitian *published* yang dikumpulkan telah dapat difiltrasi menggunakan kata kunci yang ditetapkan yakni *rural development effectiveness* dan menunjukkan hasil yang signifikan pada upaya filtrasi artikel ilmiah yang terdokumentasi. Dengan demikian objek penelitian ini hanya ukuran atau indikasi tentang efektivitas pembangunan secara organisasional yang tercantum pada artikel yang dikumpulkan pada jurnal ilmiah bereputasi secara *online*.

Prosedur

Sebagai suatu aplikasi penelitian *systematic review*, penelitian ini memiliki tipikal prosedur tersendiri yakni penggunaan *meta-sintetis* analisis (Petersen, Feldt, Mujtaba, & Mattsson, 2008; Siswanto, 2010; Tutik & Hariyati, 2009) (kualitatif) dengan penguatan meta-agregasi. Dengan demikian prosedur utama yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang dilaksanakan. Adapun topik penelitian yang didapatkan kemudian dielaborasi atau dipadukan menjadi suatu tema tertentu dan memiliki tujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian artikel ilmiah secara sistematis. Data berupa artikel ilmiah dimaksud kemudian disortir sebagai bentuk rangkuman topik penelitian *inklusif* (Petersen et al., 2008) yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yakni pendekatan yang dipergunakan serta arah kontribusi dari suatu penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Berdasarkan tipe penelitian yang telah diputuskan, maka secara detail prosedur yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup tahapan berikut.

1. Merumuskan pertanyaan penelitian tentang topik penelitian apa saja yang relevan dengan pemikiran *rural coastal development effectiveness*.

2. Menyelenggarakan suatu pencarian secara sistematis (menggunakan kata kunci sebagai bentuk filtrasi topik penelitian yang dibutuhkan).
3. Menjalankan *screening article* atau menyeleksi sesuai kesamaan *focus* penelitian, alur berfikir maupun kesesuaian secara metodologis.
4. Melaksanakan proses sintesa serta menganalisis informasi berupa temuan-temuan pada artikel ilmiah *inklusif*. Yakni hanya sebatas pada kumpulan artikel yang telah difiltrasi sedemikian rupa.
5. Melaksanakan kontrol terhadap artikel secara kualitatif.
6. Menyajikan dan mendiskusikan hasil temuan sebagaimana laporan akhir penelitian ini.

Perlu dipahami tahapan yang dilaksanakan memberikan hasil berupa laporan secara “agregat “ dan tidak berlaku bagi pemikiran lain yang berbeda posisi dengan penelitian tentang *rural coastal development effectiveness*.

Teknik Pengumpulan Data

Secara teknis penelitian mengumpulkan data berupa artikel ilmiah pada sumber (jurnal atau konferensi) dan data ini merupakan referensi lengkap atau naskah teks lengkap (bukan sebagian atau hanya abstrak). Dengan demikian data yang dikumpulkan tersebut telah mencakup beberapa hal seperti; Klasifikasi Jenis studi, ruang lingkupnya (tren penelitian yang

dapat dipahami sebagai suatu ciri spesifik), bidang ilmu yang melekat pada topik utama penelitian, memuat informasi penulis serta afiliasinya (lembaga mereka dan negara tempat keberadaannya), ringkasan penelitian termasuk pertanyaan-pertanyaan penelitian utama dan jawabannya atas pertanyaan pada masalah penelitian. apakah penelitian dimaksud mengusulkan mengusulkan suatu pedoman praktisi ataupun mengembangkan suatu pemikiran baru dalam disiplin yang ditekuninya (Kitchenham et al., 2009). Secara teknis juga diperlukan adanya pembatasan periode terbitnya artikel ilmiah yang dikumpulkan tersebut yakni atas asumsi setelah berlakunya kebijakan pembangunan desa yang diatur melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Teknik Analisis Data

Seluruh artikel ilmiah yang bersifat inklusif disajikan dalam bentuk tabulasi. Agar dapat dimengerti dengan mudah penyajian dalam bentuk table bukan merupakan hasil penggunaan metode meta-analisis (Petersen et al., 2008; Siswanto, 2010; Tutik & Hariyati, 2009) pada tipe penelitian *systematic literature review* yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Melainkan hanya menyajikan hasil perhitungan frekwensi (statistic tendensi sentral) dan *cross tabulation* sebagai informasi agregat, dan tidak ditujukan untuk mendalami/ mengkuantifikasi secara pasti hubungan sebab-akibat yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas merupakan isu yang terus menjadi bahan diskusi yang menarik khususnya bagi banyak penelitian di bidang Ilmu Administrasi Publik. Pengertian maupun upaya pengukurannya juga mencakup cara pandang yang sangat luas sehingga hingga saat ini, baik dari kalangan peneliti maupun praktisi belum menentukan adanya pemahaman konsep efektivitas atau juga indikasi yang dapat dipergunakan untuk mengukurnya secara baku. Realita ini sebenarnya memberikan informasi bahwa baik kalangan akademisi maupun praktisi yang selalu mengevaluasi pencapaian misi organisasi yang menjadi fokus perhatiannya selalu dihadapkan kepada ketidakpuasan terhadap pemahaman yang telah didapatkan tentang efektivitas itu sendiri. Akan tetapi diskusi awal yang menjadi acuan dalam penelitian ini tidaklah demikian, karena sebenarnya pendalaman literatur penelitian sebelumnya yang pernah dipublikasikan secara luas ataupun tidak dipublikasikan menunjukkan bahwa awal dari memahami konsep efektivitas selalu dikaitkan dengan lokus perhatiannya pada organisasi yang berkembang mengikuti kebutuhan permintaan (seperti pada organisasi bisnis), dan atau organisasi *nonprofit* yang mencakup bentuk yang beragam pula seperti organisasi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendonor tertentu.

Diskusi selanjutnya tentu membutuhkan jawaban apakah pemerintah desa sebagai organisasi dapat dikategorikan sebagai

organisasi *non-profit*. Penelitian akan memerlukan argumentasi tentang hal ini. Terdapat pendapat yang membedakan antartara organisasi pemerintahan dengan organisasi *non-profit*. Khususnya dalam fokus dan perhatian yang menjadi bidang utamanya. Organisasi pemerintah atau pemerintahan akan menunjukkan kecenderungan mentaati dan mematuhi dinamika politik khususnya kebijakan daripada organisasi *non-profit*. Hal ini dikarenakan secara umum organisasi pemerintah memiliki struktur yang jelas dan secara dinamis mengikuti proses kebijakan publik yang dibuat (Berman, 2002). Pemikiran ini membenarkan bahwa keterikatan organisasi pemerintah terhadap dinamika politik dan proses perumusan kebijakan berimplikasi pada aktivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah. Misalkan ketika kekuatan politik bergeser, dapat serta merta merubah prioritas pada organisasi pemerintahan. Karenanya program atau kegiatan pada organisasi pemerintah memiliki kemungkinan tidak memiliki durasi panjang dibandingkan dengan program yang dilaksanakan oleh organisasi *non-profit*. Tentunya organisasi pemerintah akan merespon demikian karena kendali aktivitas ataupun program yang dilaksanakannya juga berada pada otoritas pada level yang lebih tinggi (Ben-Ner & Ren, 2008). Artinya bisa saja organisasi nonprofit mendapatkan pendanaan jangka panjang untuk suatu program sehingga mampu berlanjut secara kontinyu, terlepas dari dinamika politik yang berkuasa serta

kebijakan apa yang menjadi prioritas dalam pemerintahan.

Meskipun diskusi di atas menunjukkan bahwa organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi non-profit, pada akhirnya akan berujung pada kesamaan yang lebih jelas yakni merupakan sekelompok orang-orang yang mengarahkan upayanya melalui program dan kegiatan untuk memberikan manfaat bagi orang yang lain di luar organisasi baik pemerintah maupun non-profit (Berman, 2002; Stark, 2011). Universitas ataupun klinik kesehatan sebagai organisasi *non-profit* memberikan kemanfaatan seperti pengembangan kualifikasi pendidikan bagi dan klinik kesehatan berguna bagi masyarakat yang ingin sembuh dari penyakit tertentu, akan terlihat sama dengan organisasi independen yang berdiri dengan maksud membangun kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di masa yang lalu. Dalam perkembangannya juga organisasi non-profit dikenal sebagai kategori organisasi yang memperhatikan dan memproduksi segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat luas termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan dan bahkan kesejahteraan sosial (Bishop, 2007). Atas dasar inilah penelitian membangun perpektif bahwa dalam hal kemanfaatannya bagi masyarakat atau dalam konteks masyarakat desa pesisir dengan karakteristik wilayah yang cenderung susah diakses, keberadaan organisasi pemerintah

seperti pemerintah desa ataupun dalam format organisasi *non-profit* akan memiliki nilai yang penting bagi pembangunan desa.

Berikut hasil perumusan dan pembatasan pertanyaan yang dipergunakan untuk mengaplikasikan *systematic literature review* sesuai diskusi sebelumnya.

Tabel 1. Deskripsi pertanyaan sistematis beserta alasannya.

No.	Pertanyaan Penelitian	Motivasi
1	Bagaimana keberadaan Topik penelitian yang telah dilaksanakan dalam studi <i>Rural Development Effectiveness (RDE)</i>	Mendapatkan gambaran keberadaan topik yang diteliti pada basis data universal yang mencakup topik penelitian yang relevan dengan studi tentang <i>Rural Development Effectiveness</i>
2	Pendekatan penelitian apakah yang paling dominan digunakan dalam studi <i>Rural Development Effectiveness</i>	Mengidentifikasi metode penelitian yang dilakukan dalam studi <i>Rural Development Effectiveness</i>
3	Teori apakah yang paling dominan digunakan dalam menganalisa permasalahan terkait <i>Rural Development Effectiveness</i>	Memetakan teori dan menemukan teori yang paling tepat dipergunakan untuk studi <i>Rural Development Effectiveness</i> yang sedang dilakukan peneliti.

Diskusi selanjutnya kembali lagi pada dikusi tentang konsep efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini. Dinamika yang terkandung dalam konsep efektivitas tersebut juga melibatkan aktor dengan karakteristik berbeda pula, sebagaimana efektivitas organisasi itu sendiri identik

dengan upaya untuk mewujudkan pencapaian produktivitas dan pengembangan organisasi yang dilakukan oleh seseorang dari level atas dalam struktur organisasi dimaksud, seperti pembuat kebijakan publik ataupun pimpinan manajerial. Hal ini mendorong penelitian ini melakukan suatu langkah yang sistematis dalam membatasi fokus atau titik tekan yang mana yang diperlukan dalam mendiskusikan konsep efektivitas yang menjadi konsep utama yang harusnya dipahami terlebih dahulu sebelum melanjutkannya pada tahapan yang lebih jauh lagi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindarkan pemikiran yang bias dalam mendalami fenomena yang terjadi seputar topik efektivitas pembangunan desa pesisir nantinya.

Berikut hasil pemetaan hasil penelitian dimaksud yang dimana penelitian mendapatkannya melalui pengumpulan data secara sistematis pada laman jurnal ilmiah bereputasi.

Tabel 2. Hasil pengumpulan data artikel ilmiah inklusif berdasarkan relevansi pertanyaan sistematis.

No.	Kategori Basis Data	Intervensi Pencarian	Artikel terkumpul	Inklusif (Artikel dlm Jurnal)
1	ProQuest Research Library		42	2
2	Schicago.jr (Scopus)		10	5
3	Google Scholar	Advance search With all of the words: Rural Development	55	12

No.	Kategori Basis Data	Intervensi Pencarian	Artikel terkumpul	Inklusif (Artikel dlm Jurnal)
		Effectiveness OR Rural Development		
4	JSTOR	Advance search With all of the words: Rural Development Effectiveness OR Rural Development	2	2
JUMLAH			99	21

Sebagai catatan Filtrasi menjadi Inklusif menggunakan cakupan pertimbangan relevansi berdasarkan topik yang tidak relevan dengan tema penelitian yang diusulkan.

Merujuk pada tabulasi jurnal inklusif tersebut menjelaskan bahwa dinamisnya upaya memahami konsep efektivitas pada *data base* literatur penelitian sebelumnya, penelitian memandang perlu membatasi bahwa cakupan penelitian ini hanya berupaya untuk memahami pemahaman konsep efektivitas yang relevan dengan topik permasalahan yang telah dijelaskan mendetail pada bab sebelumnya, yakni dalam topik penelitian efektivitas pembangunan desa pesisir. Sehingga konsep efektivitas yang dipergunakan selanjutnya adalah konsep teoritis ataupun pengalaman empirik yang diperoleh melalui review literatur yang tersedia pada data base penelitian secara sistematis (*systematic literatur review*). Sehingga secara mendalam efektivitas yang akan diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman yang valid dan spesifik.

Menurut (Cooper, 1998) bahwa perlu menelaah literatur yang berasal dari penelitian sebelumnya agar peneliti mampu meletakkan secara pasti konsep yang ingin diteliti yakni literatur penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Langkah ini sangat bermanfaat bagi peneliti agar terhindar dari kesalahan awal penelitian maupun menempatkan peneliti pada batasan yang tegas (*isolation*). Pentingnya memperoleh sintesa pemahaman yang valid dalam melaksanakan suatu penelitian telah banyak dilaksanakan oleh banyak peneliti dan mencakup berbagai disiplin ilmu eksakta maupun non eksakta, (Petersen et al., 2008) yang mengaplikasikannya pada disiplin ilmu Teknik komputasi (*software engineering*), (Cronin, Patricia, Ryan, Frances, Coughlan, 2004), (Piper, 2013) dan pada disiplin Ilmu Kesehatan, Farmasi dan Keperawatan, (Levy & Ellis, 2006) yang secara spesifik menggunakannya untuk menentukan isu terkini dalam sistem informasi, (Siddaway, 2014) dalam bidang Ilmu Manajemen, dan bahkan (Perry & Kraemer, 1986), (R. Herman, 1990), (Lan & Anders, 2000), juga telah menjabarkan dan menjelaskan hasil penggunaannya dalam penelitian untuk disiplin Ilmu Administrasi Publik.

Penelitian ini kemudian membatasi bahwa rujukan yang relevan bagi literatur penelitian sebelumnya tentang efektivitas yang dikaitkan dengan efektivitas organisasi (*organizational effectiveness*), bukan kepada hal efektivitas organisasi yang merupakan

proyeksi dari kemampuan pimpinan puncak organisasi mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi, maupun efektivitas organisasi yang dinilai berdasarkan proyeksi kinerja/pencapaian *output* dari suatu program yang dilaksanakan. Melainkan keadaannya yang cukup bervariasi dalam mempergunakan metode penelitian yang disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Disamping limitasi tersebut, penelitian juga menentukan suatu lokus perhatian pada literatur penelitian sebelumnya, yakni yang memiliki perhatian utama pada fenomena efektivitas organisasi yang terjadi pada lokus organisasi *nonprofit*. Langkah ini juga dilakukan sebagai upaya menjembatani pemahaman tentang efektivitas yang mungkin terjadi di lokasi penelitian yakni pada organisasi pemerintah desa pesisir yang merupakan wilayah terluar dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil pembatasan yang dilakukan terhadap dokumen lengkap artikel ilmiah yang ada menunjukkan klasifikasi penggunaan metode penelitian sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil pengelompokan artikel ilmiah inklusif berdasarkan frekwensinya

No.	Kategori Pendekatan Penelitian	Metode	Jumlah
1	Kualitatif	Studi Kasus	8
		Kajian Teoritis	3
		Kajian Historis	1
2	Kuantitatif	Survey	5
3	Campuran (Kualitatif-Kuantitatif)	Wawancara Mendalam dan Survey	4

Hasil tabulasi ini menggambarkan keragaman metode yang mampu dipergunakan menjawab permasalahan pembangunan desa khususnya yang dikembangkan pada penelitian ini. Paradigm studi kasus merupakan pendekatan yang paling banyak dipilih pada penelitian inklusif yang menjadi dasar yang menentukan letak penelitian ini. Karena menghindari paradigm penelitian yang cenderung digemari merupakan salah satu langkah menemukan *state of the art* penelitian yang ingin dilakukan setelahnya. Artinya letak penelitian menginginkan suatu tata letak yang spesifik sehingga memetakan penggunaan paradigm atau focus yang masih sangat jarang dilakukan oleh penelitian relevan sebelumnya menjadi pilihan yang tepat. Berikut hasil *cross tabulation* antara paradigm penelitian yang pernah dilakukan pada penelitian inklusif terhadap tipe kontribusi penelitiannya.

Tabel 4. Hasil sintesa letak penelitian inklusif

Focus/Contribute	Input	Mechanism	Perilaku	Output	JLH
Pengukuran (Measurement)	2	3	0	0	5
Perbaikan Praktik (Tools)	0	7	1	2	10
Analisis (Model)	3	2	0	1	6
JLH	5	12	1	3	21

Pengumpulan literatur penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan secara luas melalui data base jurnal ilmiah seperti mesin pencari indeks penelitian

<http://schimago.jr>, <http://scholar.google.co.id>, <http://www.jstor.org>, serta mesin pengindeks dokumen publikasi ilmiah lainnya, terbukti mampu memberikan hasil kinerja yang sangat baik. Meski demikian, penelitian ini kembali dihadapkan pada banyaknya literatur penelitian yang sangat banyak, sehingga sebagai tahap awal upaya memfiltrasinya dilaksanakan melalui filtrasi terhadap konsep efektivitas organisasi dengan lokus penelitian pada organisasi *nonprofit* atau juga penelitian yang memposisikan pemahamannya terhadap konsep efektivitas dalam disiplin Ilmu Administrasi.

Dalam diskusi ini, tentu dapat dipahami bahwa organisasi pemerintah desa pesisir adalah salah satu tipe yang termaktub dalam *local government organization* sebagaimana yang dikemukakan oleh, (R. D. Herman & Renz, 2000, 2004), (Mihaiu, Opreana, & Cristescu, 2010), (Lecy, Schmitz, & Swedlund, 2012), (Shucksmith, 2015), dan (Kruyen & van Genugten, 2017), *the other organizations* (R. Herman, 1990), logika dasar yang ingin dibangun melalui penelaahan terhadap literatur penelitian sebelumnya adalah efektivitas organisasi yang berbeda karakteristik dengan organisasi yang bertujuan mencari laba mengikuti alur pencapaian motif ekonomi.

Menelaah dan mengkritisi berbagai penelitian yang pernah dilaksanakan oleh peneliti lainnya berkenaan dengan fokus dan permasalahan yang relevan dengan fokus

serta permasalahan pada penelitian ini akan memperkaya rancangan penelitian menjadi suatu pembentukan pemikiran awal yang komprehensif. Bagian dari suatu pelaksanaan penelitian terdahulu yang mencakup hasil kesimpulan penelitian serta metodologi akan memberikan pengalaman yang sangat penting khususnya dalam mempelajari alternatif penggunaan teori serta pelaksanaan penelitian secara operasional.

Review awal penelitian ini dipandang sangat penting sebagai fondasi menentukan kualitas relevansi literatur sebelumnya yang menjadi acuan penelitian. Tahapan ini nantinya yang menentukan bahwasanya hasil diskusi yang ingin didapatkan benar-benar valid menjelaskan tentang efektivitas organisasional yang sebenarnya dimaksudkan dalam penelitian. Menurut (Cronin, Patricia, Ryan, Frances, Coughlan, 2004) menjelaskan bahwa perlunya melakukan seleksi terhadap topik-topik penelitian yang relevan mengingat bahwa setiap penelitian yang mungkin saja memiliki kesamaan dalam hal judul namun pada akhirnya ditemukan adanya fokus atau tekanan perhatian yang jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini tentu pilihan focus serta arah kontribusi penelitian ini berad pada upaya memperbaiki pelaksanaan pembangunan desa secara praktis dan *concern* tersebut terwujud pada perilaku subjek pada pemikiran “desa membangun” (lihat kembali tabel. 4). Dengan demikian rumusan yang penting menjadi temuan letak

penelitian ini berada pada *range* mengenai harmonisasi ide dan perilaku dalam konteks desa membangun.

Disamping itu, pemilihan topik penelitian merujuk pada permasalahan utama yang akan diteliti akan menampilkan kemungkinan *error* yang minimal sebagaimana *research screening, research scope and search primary studies* (Petersen et al., 2008), (Cooper, 1998) tentang *five-stage models for the synthetis process*, serta *eliminated from consideration* yang dikemukakan oleh (Piper, 2013). Berikut disajikan tabulasi hasil dari seleksi sejumlah informasi mengenai literatur penelitian yang telah dikumpulkan melalui *systematic literature review* secara kualitatif (Lan & Anders, 2000) dan (Cronin, Patricia, Ryan, Frances, Coughlan, 2004).

Hasil review terhadap berbagai publikasi penelitian sebelumnya menjelaskan adanya beragam paradigma yang dipergunakan dalam menilai ataupun mengukur konsep efektivitas organisasional untuk lokus perhatian organisasi non-profit.

1. Paradigma pertama yang dipergunakan yakni memiliki penekanan cara pandang pada tujuan organisasi (*goals*). Pertanyaan yang paling utama dikembangkan adalah bagaimana organisasi non-profit mewujudkan setiap tujuannya dengan baik. Dengan demikian penelitian yang bermaksud menilai efektivitas suatu organisasi non-profit akan menaruh perhatian

lebih kepada pencapaian *output*, sehingga organisasi secara keseluruhan dapat dikatakan memiliki efektivitas yang baik jika mampu mewujudkan setiap tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya (Cameron, 1980; R. D. Herman & Renz, 1999; Nobbie & Brudney, 2003; Willems, Boenigk, & Jegers, 2014; Coulter, 2015), *outcome* (R. Herman, 1990), *attainment the impact and goals* (Liket & Maas, 2015), serta *criteria of success* (Bourgon, 2007).

2. Paradigma kedua yakni memiliki perpektif pada sistem sumber daya. Pendekatan ini menilai efektivitas organisasional akan semakin baik dengan ditandai perolehan sumber daya bagi organisasi dari pihak eksternal organisasi semakin luas atau semakin banyak (Cameron, 1980). Pada sisi lainnya (Dehart-Davis, 2009), (Goodsell, 2018) juga berpendapat bahwa dalam mewujudkan organisasi sektor publik yang efektif diperlukan aturan main tertentu yang integrative
3. Paradigma ketiga berpandangan bahwa efektivitas organisasi dapat dinilai melalui cara organisasi berproses secara internal (*internal process*). Kelancaran proses dapat ditandai melalui bermacam-macam diskusi seperti minimnya ketegangan yang terjadi antara struktur

dalam organisasi, alur informasi antar individu yang berjalan dengan baik serta integritas setiap anggota yang terlibat dalam organisasi sangat tinggi. Organisasi akan menjadi efektif ketika memiliki karakteristik tersebut, dan dapat dikatakan tidak efektif jika berlaku sebaliknya (Cameron, 1980), model proses (R. D. Herman & Renz, 1999).

4. Paradigma keempat yakni memiliki kecenderungan patokan penilaian efektivitas organisasional pada fokus kepuasan secara internal dan eksternal. Diskusi ini menjelaskan bahwa efektivitas organisasi secara keseluruhan dapat diketahui pada capaian kepuasan anggota organisasi (Cameron, 1980) atau juga *stakeholder*-nya (R. Herman, 1990; R. D. Herman & Renz, 1999).

Demikian kompleksnya upaya mengukur konsep efektivitas organisasi dalam berbagai penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud menentukan paradigma mana yang dipergunakan peneliti untuk mengukur sampai dengan menderivasikannya kepada berbagai indikasi yang relevan bagi upaya membangun desa pesisir sebagaimana aplikasinya setelah diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Paradigma yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah paradigma pertama yakni paradigma goal achievement (R. Herman, 1990; R. D. Herman & Renz, 1999)

juga paradigma *goal attainment* (Liket & Maas, 2015) serta *motivation to enhance several form of motivation that linked to mission* (Rainey & Steinbauer, 1999), *bureaucratic effectiveness on perceived mission* (Wolf, 1993). Sudut pandang pada paradigma ini menjelaskan bahwa pencapaian tujuan melalui beragam strategi organisasi merupakan karakteristik organisasi yang penggunaannya sederhana karena tujuan organisasi merupakan hal yang mungkin untuk diukur secara mendetail (R. D. Herman & Renz, 1999, 2004; Liket & Maas, 2015). Dalam pendekatan ini akan memberikan perhatian lebih kepada upaya mewujudkan keberhasilan pencapaian program kegiatan organisasi, misalnya menggunakan ukuran SMART (Liket & Maas, 2015) yang didefinisikan sebagai Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-bound.

Argumentasi penelitian yang dapat dijelaskan berkenaan dengan diskusi di atas, bahwa penentuan paradigma *goal attainment* sebagai acuan perpektif penelitian secara teoritis adalah karakteristik organisasi khususnya desa pesisir di wilayah terluar dan terdepan di Indonesia telah dilengkapi berbagai dokumen perencanaan strategis serta hasil laporan kinerja dalam suatu periode tertentu (mungkin dapat diakses dan telah menjadi tradisi sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi pemerintah desa sejak diberlakukannya kebijakan tentang desa di Indonesia). Pemerintah desa saat ini telah

merasakan tuntutan akuntabilitas yang sedemikian kompleks sehingga dalam prakteknya berdasarkan aturan yang berlaku harus melengkapi beberapa dokumen maupun proses partisipatif seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 6 Tahun, Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 tahun serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Hal ini juga merupakan persyaratan dalam melaksanakan aktivitas kewenangan pengelolaan keuangan di desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UURI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Oleh karenanya fenomena yang dihadapi terkait praktek pembangunan oleh pemerintah desa akan semakin dekat pemahamannya dengan konsep yang telah menjadi diskusi mendalam pada penelitian ini. Dengan kata lain, paradigma *goal achievement* ataupun *goal attainment* ini menjadi sangat relevan dengan praktek pemerintah desa dalam kerangka pembangunan desa di wilayah pesisir terluar dan terdepan di Indonesia.

Variasi dalam pengukuran rural coastal development effectiveness

Literatur penelitian sebelumnya telah menjelaskan berbagai ukuran yang cukup kompleks. Namun demikian konteks diskusi bagi pemahaman penelitian tentang konsep efektivitas organisasi desa di wilayah pesisir tentu akan menunjukkan aplikasi yang berbeda, sehingga pilihan pengukuran yang

tepat bagi spesifikasi organisasi pada lokus penelitian memerlukan proses validasi yang hasilnya tentu saja hanya dimaksudkan bagi pengukuran efektivitas organisasional desa pesisir di wilayah terluar. Hasil diskusi inilah yang menjadi pembeda paling signifikan antara pengukuran efektivitas organisasi yang dijelaskan pada literatur relevan sebelumnya dengan penelitian ini.

Proses pencapaian tujuan organisasional oleh pemerintah desa sebenarnya telah menjelaskan secara langsung maupun tidak langsung hal ihwal efektivitas organisasional pemerintah desa yang dipandang sangat penting. Namun demikian, produksi kebijakan pada tingkatan pemerintahan di atasnya sebenarnya berlaku secara general, yakni digariskan secara formal melalui kebijakan seperti UU, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, akan tetapi format pengukuran yang ada tersebut tentu memberi kesan "Joker" yakni menjadi acuan bagi pemerintah secara umum. Dengan demikian, atas argumentasi bahwa efektivitas organisasi sangat mungkin diukur melalui pendekatan dan teori yang spesifik yakni yang dibangun atas fenomena yang terjadi merujuk organisasi dimaksud secara sempit (nature)(R. D. Herman & Renz, 2004; Rainey & Steinbauer, 1999; Wolf, 1993), maka perlu membangun dan mengkonstruksi pengukuran yang spesifik pula bagi upaya menilai efektivitas organisasional pada pemerintah

desa di wilayah desa pesisir terluar dan terdepan.

Berikut dua kategori teori yang dibangun dan dipergunakan oleh kalangan peneliti dan praktisioner dalam mengukur efektivitas organisasional (*organizational effectiveness* atau *OE*). Kedua teori ini jelas berasal dari karakteristik upaya yang berbeda dalam pemahamannya yakni mencoba mengukur efektivitas organisasional berdasarkan kacamatan dan pengalaman peneliti dan yang lainnya menggunakan pemahaman dan pengalaman praktisi sebagai orang yang menekuni usaha pencapaian tujuan organisasi secara langsung.

Dalam perspektif praktisioner mencakup 3 indikasi pengukuran yakni mencakup fokus perhatiannya secara praktis mencakup; (1) Menyatakan misi organisasi secara detail, (2) Keterkaitan antara pernyataan misi dengan aktivitas utama, (3) Strategi jangka panjang (3 tahun minimal) dan (4) Indikasi menuangkan tujuan organisasi secara *SMART*. Selanjutnya indikasi strategi yang dipergunakan yang meliputi; (1) Konteks strategi yang sesuai dengan misi yang sama (*similarity*), (2) Alternatif aktivitas yang berkesesuaian dengan misi utama yang akan dilaksanakan, (3) Pertimbangan resiko kegagalan, serta (4) Partisipasi dalam proses penyusunan strategi. Terakhir menyangkut pengukuran pelaksanaan kepemimpinan organisasional secara praktis yang ditunjukkan melalui Pemisahan yang jelas antara pemimpin dengan pimpinan lain di level atasnya

Perspektif praktisioner berarti orang yang mempraktekkan langsung kegiatan organisasi sehingga terlihat berbeda jika secara konseptual efektivitas diukur melalui perspektif peneliti. Pilar penilaian melalui fokus, strategi dan praktek kepemimpinan pada organisasi merupakan hasil dari konfirmasi terhadap sejumlah praktisi melalui *focus group discussion* (Liket & Maas, 2015), sehingga indikasi yang dihasilkan untuk mengoperasionalkan konsep efektivitas organisasional ini. Dengan kata lain pengukuran konsep efektivitas organisasional sebagaimana diajukan tersebut dibangun sendiri berdasarkan pemahaman dan pengalaman praktisioner yang telah berpraktek melaksanakan program dan kegiatan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control pada organisasi.

Cara memandang dan menilai konsep efektivitas organisasi yang dibangun kalangan peneliti melalui kekayaan literatur yang menjadi referensinya berbeda dengan pilar penilaian efektivitas organisasi oleh (Liket & Maas, 2015). Meski diklasifikasikan kedalam satu paradigma teori tentang efektivitas organisasi, ukuran- ukuran operasional dari konsep yang sama menunjukkan hasil yang berbeda dipahami sebagai suatu keragaman yang melekat pada karakter masing- masing organisasi yang dinilai.

Perspektif selanjutnya justru melibatkan para peneliti yang memberikan gambaran model pengukuran yang lebih beragam yakni memiliki 2 pendapat yang berbeda.

Perspektif peneliti 1 menjelaskan adanya upaya strategis mengukur beberapa indikasi penting seperti; (1) Strategi Manajemen Perubahan, (2) Klasifikasi legitimasi organisasi secara luas, (3) Sumber pendapat-an baru yang mampu diberdayakan, serta (4) Stategi penghematan organisasi (*resources*). Sedangkan dalam kategori peneliti II dimaksudkan kepada pengukuran pada hal-hal indikatif meliputi; (1) Misi organisasi (orientasi pada publik) yang dapat diproyeksikan melalui Penekan pada kejelasan misi dan tujuan organisasi, kepemimpinan/kanajemen SDM, karyawan merasa bangga akan organisasi dan produknya, fokus pada menjaga keadilan, menghormati dan komunikasi terbuka, mendelegasi tanggung jawab dan otoritas seluas mungkin, manajemen bertujuan memberi semangat pada orang-orang, manajemen menekankan cara-cara inovatif. Sedangkan (2) merupakan indikasi Desain Tugas (Lingkungan Pekerjaan) meliputi upaya menanamkan *value* organisasi kepada setiap orang dan kejelasan daftar tugas dan atau pekerjaan terhadap tujuan.

Perspektif peneliti I dan II berarti orang-orang baik dari kalangan akademisi maupun praktisi di bidang penelitian yang telah melakukan penelitian tentang efektivitas organisasi dalam paradigma *goal achievement* sesuai diskusi sebelumnya. Indikator yang dipergunakan dalam mengukur efektivitas organisasional padan perspektif Peneliti I dan II merupakan indikasi yang ditentukan secara teoritik dan

divalidasi secara deskriptif melalui teknik penyebaran kuesioner. Dalam hasil diskusi inilah sebenarnya dipahami bahwa tidak ada satupun model pengukuran efektivitas organisasi pada paradigma tertentu mampu mendekati sempurna bagi organisasi yang lain (eksklusif/ spesifik).

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan diskusi yang dilaksanakan sebelumnya, penelitian menyimpulkan bahwa menggunakan aplikasi *systematic review* terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meletakkan posisi penelitian dalam peta disiplin yang ditekuni serta mendapatkan kekuatan yang sistematis dalam upaya menjelaskan penggunaan teori bagi penelitian tentang pembangunan desa secara spesifik.

Pemahaman konsep tentang efektivitas pembangunan desa sangat kompleks dan menghasilkan bias pengertian yang signifikan. Oleh karenanya menetapkan batasan spesifik sesuai tujuan penelitian, *screening article*, mengklasifikasikan hasilnya pada kriteria tematik tertentu, interpretasi dan analisis agregasi, menghasilkan simpulan bahwa konsep efektivitas organisasional yang dipergunakan untuk mengukur potret keberhasilan pembangunan desa sebagai salah satu bentuk nyata organisasi yang tidak berorientasi kepada keuntungan, dapat diukur menggunakan paradig *goal attainment*

serta memproyeksikannya berdasarkan variabel fokus, strategi dan praktik kepemimpinan. Konsep efektivitas organisasional ini dibangun atas pemahaman dan pengalaman kalangan praktisi yang dirangkum secara sistematis. Penggunaan ukuran-ukuran pada teori efektivitas organisasional tersebut dipandang sangat tepat dan berkesesuaian dengan topik desa membangun atau membangun desa yang sedang berlangsung secara dinamis di Indonesia.

Studi literatur secara sistematis juga mampu menghasilkan gambaran mendalam tentang teori yang dapat dipergunakan serta model pengukuran yang akan dipergunakan termasuk pengukuran dalam perspektif praktisi ataupun kalangan peneliti.

Saran

Hasil penelitian menjelaskan bahwa letak penelitian yang menitikberatkan pada perilaku agen pembangunan dalam konteks substansi desa membangun Indonesia yang dialami melalui pendekatan kualitatif seyogyanya masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Sehingga ketertarikan mengembangkan kontribusi pemikiran efektivitas pembangunan desa secara praktis akan memiliki posisi yang strategis di masa yang akan datang.

Atas temuan penelitian yang masih menggunakan teknik analisa agregasi, peneliti bermaksud merekomendasikan penggunaan teknik sistesis yang juga detail dan didukung oleh aplikasi statistik

inferensia yang komprehensif atau bahkan memadukan keduanya, akan memberikan ketepatan pengukuran yang lebih mendekati keinginan penelitian yang dilakukan tentang efektivitas selanjutnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Desa dan Kota.
- Ben-Ner, A., & Ren, T. (2008). Does Organization Ownership Matter? *Structure and Performance in For-Profit, Nonprofit and Local Government Nursing Homes*.
- Berman, H. J. (2002). Doing "Good" vs. Doing "Well": The Role of Nonprofits in Society. *Inquiry*, 39(Spring), 5–11. <https://doi.org/10.5034/inquiryjrnl>
- Bishop, S. W. (2007). Linking Nonprofit Capacity to Effectiveness in the New Public Management Era: The Case of Community Action Agencies. *State and Local Government Review*, 39(3), 144–152. <https://doi.org/10.1177/0160323X0703900303>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research in education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 2194.
- Bourgon, J. (2007). Responsive, responsible and respected government: Towards a New Public Administration theory. *International Review of Administrative Sciences*, 73(1), 7–26. <https://doi.org/10.1177/0020852307075686>
- Cameron, K. (1980). Critical Questions in Assessing Organizational Effectiveness. *Organizational Dynamics*, 66–80.
- Cooper, H. (1998). *Cooper.pdf* (Second Edi). Sage Publication.
- Coulter, P. B. (2015). Effectiveness in the Public Sector: The Example of Municipal Fire Protection, 24(1), 65–81.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Educational Research (4th Editio). Lincoln: University of Nebraska.
- Cronin, Patricia, Ryan, Frances, Coughlan, M. (2004). Undertaking a Literature Review. *Doing Postgraduate Research*, 4(4), 411–429. <https://doi.org/10.1177/107808747000500401>
- Dehart-Davis, L. (2009). Green tape: A theory of effective organizational rules. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(2), 361–384. <https://doi.org/10.1093/jopart/mun004>
- Goodsell, C. T. (2018). Leisha DeHart-Davis, Creating Effective Rules in Public Sector Organizations, 00(expected), 1–3. <https://doi.org/10.1111/puar.12944>
- Herman, R. (1990). Methodological Issues in Studying the Effectiveness of Nongovernmental and Nonprofit Organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, (19), 293–306.
- Herman, R. D., & Renz, D. O. (1999). Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly Theses on Nonprofit Organizational Effectiveness, 28(2), 107–126. <https://doi.org/10.1177/0899764099282001>
- Herman, R. D., & Renz, D. O. (2000). Board practices Of Especially Effective and Less Effective....pdf, 30(2), 146–160.
- Herman, R. D., & Renz, D. O. (2004). Doing Things Right: Effectiveness in Local Nonprofit Organizations, A Panel Study. *Public Administration Review*, 64(6), 694–704. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00416.x>
- Ilmu, J., Holidin, D., & Handini, R. S. (2014).

- Sound Governance Analysis in the Innovation of Traditional Market Revitalization and Street Vendors Management. *International Journal Of Administrative Science & Organization*, 21(1), 17-26. <https://doi.org/10.20476/jbb.v21i1.4040>
- Indonesia. (2014). UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, (1), 103. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering - A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 51(1), 7-15. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>
- Kruyen, P. M., & van Genugten, M. (2017). Creativity in local government: Definition and determinants. *Public Administration*, 95(3), 825-841. <https://doi.org/10.1111/padm.12332>
- Lan, Z., & Anders, K. K. (2000). A Paradigmatic View of Contemporary Public Administration Research: An Empirical Test. *Administration & Society*, 32(2), 138-165. <https://doi.org/10.1177/00953990022019380>
- Lecy, J. D., Schmitz, H. P., & Swedlund, H. (2012). Non-Governmental and Not-for-Profit Organizational Effectiveness: A Modern Synthesis. *Voluntas*, 23(2), 434-457. <https://doi.org/10.1007/s11266-011-9204-6>
- Levy, Y., & Ellis, T. J. (2006). A systems approach to conduct an effective literature review in support of information systems research. *Informing Science*, 9, 181-211. <https://doi.org/10.1049/cp.2009.0961>
- Liket, K. C., & Maas, K. (2015). Nonprofit Organizational Effectiveness: Analysis of Best Practices. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 44(2), 268-296. <https://doi.org/10.1177/0899764013510064>
- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, 6-8.
- Mihaiu, D., Opreana, A., & Cristescu, M. P. (2010). Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 13(4), 132-147. Retrieved from http://www.ipe.ro/rjef/rjef4_10/rjef4_10_10.pdf
- Nagendrababu, V., Pulikkotil, S. J., Sultan, O. S., Jayaraman, J., & Peters, O. A. (2018). Methodological and Reporting Quality of Systematic Reviews and Meta-analyses in Endodontics. *Journal of Endodontics*, 44(6), 903-913. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2018.02.013>
- Nobbie, P. D., & Brudney, J. L. (2003). Testing the Implementation, Board Performance, and Organizational Effectiveness of the Policy Governance Model in Nonprofit Boards of Directors. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 32(4), 571-595. <https://doi.org/10.1177/0899764003257460>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (2014).
- Perry, J. L., & Kraemer, K. L. (1986).

- ARTICLES : Probing the Field. *Public Administration Review*, 46(3), 215–226. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/3110436>
- Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., & Mattsson, M. (2008). Systematic Mapping Studies in Software Engineering. *12Th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, 17, 10. <https://doi.org/10.1142/S0218194007003112>
- Piper, A. R. J. (2013). How to write a systematic literature review : a guide for medical students. In *National AMR, Fostering Medical Research* (pp. 1–8). University of Edinburgh.
- Rainey, H. G., & Steinbauer, P. (1999). Galloping Elephants : Developing Elements of a Theory of Effective Government Organizations, 9, 1–32.
- Shucksmith, M. (2015). Future directions in rural development: Executive summary. Retrieved from <http://www.carnegieuktrust.org.uk/CMSPages/GetFile.aspx?guid=545a7523-4da8-4ff7-95e6-dd912abc6373>
- Siddaway, A. (2014). What is a systematic literature review and how do I do one? *University of Stirling*, (li), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2009.03.017>
- Siswanto. (2010). Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4), 326–333.
- Stark, A. (2011). The distinction between public, nonprofit, and for-profit: Revisiting the “core legal” approach. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(1), 3–26. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq008>
- Tutik, R., & Hariyati, S. (2009). Sistematic review theory. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 13, 124–132.
- Willems, J., Boenigk, S., & Jegers, M. (2014). Seven Trade-offs in Measuring Nonprofit Performance and Effectiveness. *Voluntas*, 25(6), 1648–1670. <https://doi.org/10.1007/s11266-014-9446-1>
- Wolf, P. J. (1993). A Case Survey of Bureaucratic Effectiveness in U . S . Cabinet Agencies : Preliminary Results 1, 161–181.

6. Profil Singkat

Penulis merupakan kandidat doctor pada bidang ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Lahir pada tanggal 16 September 1982 dan hingga saat ini telah menamatkan pendidikan Strata-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2006. Juga telah menamatkan pendidikan Strata-2 pada Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara lulus pada tahun 2009. Sebelum mengikuti pendidikan Doktorat yang saat ini ditekuni, penulis beraktivitas sebagai pengajar tidak tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

